

## Komisi I DPR Menyetujui Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

JAKARTA (IM) - Komisi I DPR RI menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono. Agus disetujui oleh sebanyak sembilan fraksi di Komisi I DPR RI.

“Memberikan persetujuan kepada kelengkapan calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI,” Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Senin (13/11).

Selain persetujuan terhadap Agus, rapat hari ini juga menyetujui pemberhentian dengan hormat kepada Panglima TNI Yudo Margono. Selanjutnya, persetujuan ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

“Kami akan bersurat ran

disahkan di paripurna dan selanjutnya menunggu jadwal pelantikan dari Presiden,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subiyanto tiba di Gedung Nusantara II DPR RI. Agus bakal menjalani uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai calon Panglima TNI oleh Komisi I DPR RI.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Agus tiba pukul 9.40 WIB. Agus terlihat didampingi oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali. ● me

## Panglima Rotasi Pejabat TNI AD, Letjen Arif Rahman Jadi Wakasad

JAKARTA (IM) - Panglima TNI merotasi sejumlah pejabat strategis TNI Angkatan Darat (AD). Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1286/XI/2023 tanggal 9 November 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Letnan Jenderal (Letjen) Arif Rahman dirotasi dari posisi Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD (Dankodiklatad) menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad). Pengisi posisi Dankodiklatad masih kosong.

Jabatan strategis TNI AD lain yang dirotasi adalah Inspektur Jenderal TNI AD (Itrjenad). Letjen Alfred Denny D Tjech bakal menggantikan posisinya sebagai Itrjenad. Ia akan dirotasi menjadi perwira tinggi (pati) di Markas Besar TNI AD dalam rangka pensiun. Posisinya akan di-

ganti oleh Mayor Jenderal (Mayjen) Hilman Hadi yang sebelumnya menjabat Staf Khusus KSAD.

Selain itu, jabatan Komandan Pusat Intelijen TNI AD (Danpusintelad) juga mengalami pergantian, dari Brigadir Jenderal (Brigjen) Rudy Rachmat Nugraha ke Brigjen Dian Hardiana. Rudy Rachmat selanjutnya akan menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI.

Sementara itu, Dian Hardiana sebelumnya mengisi posisi Wakil Asisten Intelijen KSAD. Dalam mutasi tersebut, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa ditugaskan menjadi wakil kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Letjen (Purn) Teddy Lhaksana. Nyoman Cantiasa sebelumnya menjabat Koordinator Staf Ahli (Koorstahli) KSAD. ● han

FOTO: ANTARA



### MAHFUD MD HADIRI WORKSHOP IMPLEMENTASI UNCAC DI INDONESIA

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan materi saat pelatihan Implementasi Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) di gedung Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/11). Mahfud MD menjadi pembicara kunci dalam acara pelatihan itu untuk meninjau dan mengevaluasi implementasi the United Nations Against Corruption atau konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) di Indonesia yang berlangsung 13-14 November 2023.

## Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 23 Kilogram Sabu di Kalimantan Utara

TARAKAN (IM) - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur (Kalbagtim), Bea Cukai Tarakan, dan Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya, berhasil menangkap penyelundupan narkotika jenis sabu di perairan Pangkalan Tias, Kabupaten Bulungan.

Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan Johan Pandores mengatakan, penindakan tersebut merupakan hasil sinergi tim gabungan antarinstansi penegak hukum di laut pada wilayah Kota Tarakan Kalimantan Utara.

“Penindakan terlaksana pada tanggal 6 November 2023 di perairan Pangkalan Tias, Kabupaten Bulungan.

Dalam penindakan itu, tim gabungan menggagalkan aksi penyelundupan 23 paket narkotika jenis methamphetamine dengan berat sekitar 23.000 gram narkotika yang disamarkan dalam kemasan teh,” dalam konferensi pers pada Rabu (8/11) lalu.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Komandan Lantamal XIII Tarakan, Kepala BNNP Kalimantan Utara, serta Direktur Polair Polda Kaltara.

Pada saat penindakan, petugas juga mengamankan dua orang warga Semporna/Tawi-tawi, yang diduga pelaku penyelundupan. Terduga pelaku sebelumnya sempat berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut, tetapi dapat diamankan oleh petugas tim gabungan.

“Penindakan narkotika ini merupakan upaya nyata Bea Cukai, khususnya jajaran Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur untuk melaksanakan tugas sebagai *community protector* dalam rangka melindungi masyarakat dari pemasukan barang-barang berbahaya dengan bersinergi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum terkait,” papar Johan. ● me

**PENGUMUMAN**  
RENCANA PENGAMBILAN  
PT GENERASI ANAK INDONESIA BERKEMBANG

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atas sebagian saham-saham milik PT GENERASI ANAK INDONESIA BERKEMBANG (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT GENERASI ANAK INDONESIA BERKEMBANG  
Jalan Wahid Hasyim No. 102,  
Desa/Kelurahan Kebon Sirih,  
Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat  
Provinsi DKI Jakarta, 10340  
Telp: 08128621991  
Jakarta, 14 November 2023  
Direksi  
PT GENERASI ANAK INDONESIA BERKEMBANG

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



### UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON PANGLIMA TNI

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon Panglima TNI di ruang Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (13/11). Jenderal TNI Agus Subiyanto merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

# Jika Ada UU Pembuktian Terbalik akan Buat Pemerintah Lebih Galak Rampas Aset Koruptor

UU Pembuktian terbalik diberlakukan, maka jika ada kekayaan seseorang melebihi profilnya, harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya itu.

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menginginkan ada undang-undang pembuktian terbalik agar pemerintah lebih galak lagi melakukan rampasan terhadap aset para koruptor. Jika diperlukan, nantinya pemerintah akan menyusun undang-undang (UU) Pembuktian Terbalik yang progresif.

“Kita akan tetap semakin galak untuk rampasan aset para koruptor ini. Kalau perlu nanti pada saatnya kita buat UU pembuktian terbalik, meskipun untuk sebagian UU, pembuktian terbalik (sekarang) itu sudah dilakukan ya,” ujar Mahfud usai menghadiri acara United Nations Convention against Corruption (UNCAC) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (13/11).

“Artinya apa? Seorang terpidana harus membuktikan harta yang lebih itu dari mana? Kalau tidak dibuktikan, itu diambil. Nah kalau kita nanti lebih progresif, UU pembuktian terbalik itu (diberlakukan) agak awal saja sebelum di sidang pengadilan,” lanjutnya.

Mahfud kemudian menjelaskan bagaimana UU Pembuktian Terbalik itu diberlakukan, yakni dengan melihat kekayaan individu. Ketika ada individu yang kekayaannya melebihi profilnya, maka bisa diminta untuk membuktikan. “Kalau seharusnya gajinya lima tahun itu misalnya Rp6 miliar, atau Rp7 miliar kok

sesudah lima tahun akumulasi hartanya pertambahannya lebih dari Rp10 miliar nah itu tetapkan saja,” katanya.

“Anda buktikan dong kelebihan ini, kalau enggak kita anggap korupsi, gitu saja. Nah itu di beberapa negara ada yang sudah begitu. Nah kita nanti suatu saat mungkin bisa gitu,” katanya.

Mahfud juga menyinggung soal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI belum juga bisa diajak fokus untuk menyelesaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Penyebabnya, ada perkembangan situasi politik yang menyebabkan hal tersebut.

“RUU Perampasan Aset sudah masuk ke DPR, terserah DPR saja. Dan di sana nampaknya perkembangan politik belum bisa mengajak mereka konsentrasi menyelesaikan RUU Perampasan aset itu,” ujar Mahfud.

“Kita tidak apa-apa juga. Itu wewenang DPR, silakan

lah. Kapan (diselesaikan). Yang penting pemerintah sudah menunjukkan itikad baik,” katanya menambahkan.

Namun menurut Mahfud, pemerintah selama ini sudah melakukan rampasan aset secara luar biasa. Salah satu contoh penerapannya yakni saat ada pelaku korupsi yang mulanya didakwa Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar. Kemudian pada, praktiknya vonis yang dijatuhkan bisa mencapai Rp 100 miliar lebih. Selain itu, ada aset-aset lain yang dirampas.

“Itu sudah dilakukan. Kami dalam kasus BLBI, Satgas BLBI misalnya, meskipun itu perdata kami rampas asetya,” kata Mahfud.

“Sekarang kami sudah dapat Rp 34 triliun lebih dalam waktu 1,5 tahun. Itu sudah rampasan aset. Nah kalau UU di DPR agak lambat ya biarkan saja DPR itu mengolah sendiri berdasarkan prioritas kebutuhannya,” tuturnya. ● han

## Menteri Yasonna Ngaku Tak Tahu Keberadaan Wamenkumham Usai Ditetapkan Tersangka

JAKARTA (IM) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengaku tidak mengetahui di mana keberadaan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarij atau Eddy, setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, Eddy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.

“Saya enggak tahu, enggak tahu (di mana Wakil Menteri Hukum dan HAM),” katanya singkat sebelum memasuki mobil di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Yasonna menyampaikan, ia baru saja pulang dari luar negeri sehingga tidak mengetahui di mana wakilnya berada. Lawatannya ke luar negeri untuk mengurus beberapa pekerjaan. Ia diketahui sempat pergi ke Beijing, Tiongkok, dan memberikan kuliah umum di University

of International Business and Economics, Beijing (UIBE) pada Rabu pekan lalu.

“Saya baru datang dari luar negeri,” ucapnya lagi.

Kendati demikian, Yasonna mempersilakan KPK memproses Eddy sesuai dengan aturan dan mekanisme hukum yang berlaku.

“Silakan saja proses, tapi kan kita harus ada asas praduga tak bersalah,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK telah menetapkan Eddy Hiarij sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi.

“Pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar, itu sudah kami tanda tangani sekitar dua minggu yang lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/10) lalu.

Alex mengatakan, pihaknya telah menandatangani Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk empat orang tersangka. Menurut Alex, sebanyak tiga di antaranya

diduga menerima suap dan gratifikasi. Sementara satu pihak lainnya merupakan terduga pemberi suap.

“Dari pihak penerima tiga pemberi satu,” ujar Alex.

Perkara dugaan korupsi yang menjerat Eddy ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng teguh Santoso terkait dugaan penerimaan gratifikasi Rp 7 miliar pada 14 Maret 2023. Namun, dalam perjalanannya KPK menemukan meeting of mind atau titik temu yang menjadi kesepakatan kedua pihak.

Meeting of mind itu menjadi latar belakang aliran dana ke Eddy Hiarij. Setelah *diverifikasi* dan ditelaah, pihak Pengaduan Masyarakat melimpahkan laporan itu ke Direktorat Penyidikan KPK.

Eddy diduga menerima gratifikasi Rp 7 miliar dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. ● han

FOTO: ANT



### PRABOWO SAMPAIKAN ARAH DAN STRATEGI POLITIK LUAR NEGERI

Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto (tengah) bersiap untuk menyampaikan pidato politik dalam acara yang bertajuk ‘Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri’ di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Jakarta, Senin (13/11).

## Anwar Usman Tak Hadiri Pelantikan Suhartoyo Jadi Ketua MK, Alasan Sakit

JAKARTA (IM) - Eks mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tak menghadiri Sidang Pleno Khusus pengucapan sumpah Ketua MK yang baru, Suhartoyo. Anwar Usman izin tidak bisa hadir karena harus ke Rumah Sakit.

“Beliau (Anwar Usman) tadi saya coba untuk hubungi, beliau izin mau ke rumah sakit,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Senin (13/11).

Pengucapan sumpah itu sendiri digelar pukul 10.00 WIB di Gedung MK I, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Suhartoyo mengungkapkan bahwa Anwar Usman kondisinya kurang sehat.

“Mungkin kondisinya kurang sehat,” ucap Suhartoyo.

Suhartoyo resmi menggantikan paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), setelah mengucap sumpah dalam sidang Pleno khusus di Gedung MK I, Senin (13/11).

Suhartoyo mengucapkan sumpahnya untuk memenuhi kewajiban sebagai Ketua MK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Memegang teguh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta kepada

nusa dan bangsa,” kata Suhartoyo saat membacakan sumpahnya.

Suhartoyo yang terpilih sebagai Ketua dilakukan melalui pemilihan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim yang tertutup pada Kamis (9/11) lalu.

### Tangis Suhartoyo Pecah

Suhartoyo tak kuasa membendung air matanya saat membacakan pidato usai pembacaan sumpahnya sebagai ketua baru MK. Ia mengatakan jika ekspektasi dan harapan yang tinggi dibebankan dipundaknya sebagai Ketua MK yang baru untuk mengembangkan kepercayaan publik terhadap marwah MK.

“Bersama dengan yang mulia wakil ketua yang mulia Profesor Doktor Saldi Isra dan Bapak Ibu hakim konstitusi lainnya,” kata Suhartoyo dalam pidatonya.

“Kami telah meneguhkan komitmen bersama untuk saling bahu membahu dalam membangun kembali kepercayaan publik dan Marwah Mahkamah Konstitusi,” katanya menambahkan.

Terlebih kepercayaan publik yang dimaksud sangat diperlukan menjelang penangan sengketa hasil pemilihan umum 2024

“Sebagai langkah awal pembuktian dari kami dan tuntutan serta harapan masyarakat mahkamah Konstitusi akan mempercepat pembentukan majelis kehormatan mahkamah konstitusi secara permanen,” katanya. ● han